

INDONESIA DAN *TRANS PASIFIK PARTNERSHIP* (TPP) DALAM PERSPEKTIF *WORD SYSTEM*

Rahadi Ependi

FISIP Universitas Riau, Kampus Bina Widya Km. 12,5 Simpang Baru Panam, Pekanbaru 28293

Abstract: Trans-Pacific Partnership (TPP) is a more comprehensive trade agreement covering everything that's needed to stretch power. Against TPP, Indonesia faces a more complicated issue, since it is considered essentially a liberalization of trade and investment. This study aims to analyze the prospect of the position of Indonesia if it joined the TPP. The research method used is qualitative with literature study technique. This research method aims to examine the condition of natural objects, which a researcher is regarded as a key instrument. The results show that TPP is actually a proof of foreign diplomacy in offering various theories in understanding and explaining the phenomenon of international relations. If Indonesia participates in this trade agreement it will have a long-term effect on Indonesia's Domestic Politics and Economy. TPP may be signed if the issues expressed by academic groups and interested parties can be solved first..

Abstrak: *Trans-Pacific Partnership* (TPP) merupakan perjanjian perdagangan lebih mencakup segala hal yang telah diperlukan untuk meregangkan kekuasaan. Terhadap TPP, Indonesia menghadapi persoalan yang lebih rumit, karena dinilai pada hakikatnya adalah liberalisasi perdagangan & investasi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis prospek posisi Indonesia jika bergabung dengan TPP. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan teknik studi pustaka. Metode penelitian ini bertujuan untuk meneliti kondisi objek alamiah, yang mana seorang peneliti dianggap sebagai instrumen kunci. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebenarnya TPP merupakan bukti diplomasi luar negeri dalam memberikan tawaran berbagai macam teori dalam memahami dan menjelaskan fenomena hubungan internasional. Jika Indonesia ikut dalam perjanjian perdagangan ini akan berpengaruh dalam jangka masa panjang berkenaan dengan Politik dan Ekonomi Domestik Indonesia. TPP boleh ditandatangani sekiranya isu-isu yang diutarakan oleh golongan akademik dan pihak berkenpentingan dapat diatasi terlebih dahulu.

Kata Kunci: perjanjian perdagangan, *word system*, TPP

PENDAHULUAN

Trans-Pacific Partnership merupakan perjanjian perdagangan lebih mencakup segala hal yang telah diperlukan untuk meregangkan kekuasaan.¹ Perjanjian ini merupakan pengembangan dan lanjutan dari perjanjian yang sudah berlaku diantara empat negara, yaitu Brunei Darussalam, Singapura, Chili, dan Selandia Baru yang dikenal dengan nama *Trans Pacific Strategic Economic Partnership* (TPSEP)². Pada tahun 2011, TPP mengeluarkan garis besar institusi ini, sehingga memberikan gambaran mengenai latar belakang, instrumen, konsep, dan tujuan dari negosiasi perdagangan ini. TPP berfokus pada cara-cara di mana transparansi dan partisipasi demokratis telah diganggu oleh kekuasaan korporasi dan kepentingan kebijakan

luar negeri AS dalam negosiasi perjanjian.

Sejarah peralihan TPP, berasal pemimpin-pemimpin negara Singapura, Chili, dan Selandia Baru mengumumkan bahwa mereka akan melakukan negosiasi untuk pembuatan perjanjian perdagangan bebas. Pada tahun 2008, 8 negara lainnya menyatakan bergabung, yaitu Australia, Kanada, Jepang, Malaysia, Meksiko, Peru, AS, dan Vietnam. Pembentukan TPP disepakati oleh ke-12 negara itu pada tanggal 12 Oktober 2015.³ 12 negara anggota yang telah mengikuti TPP, tujuh di antaranya telah menjalin beberapa kemitraan dan kerjasama dengan Indonesia. 12 negara anggota tersebut antara lain AS, Jepang, Brunei Darussalam, Malaysia, Vietnam, Singapura, Australia, Selandia Baru, Kanada, Meksiko, Chile, dan Peru. Kedua belas negara tersebut mampu menjadi penggerak 40 persen ekonomi dunia⁴.

¹ Perwakilan Dagang AS, atas nama Presiden George W. Bush, diberitahu Kongres pada bulan September 2008 bahwa ia bermaksud untuk masuk ke dalam negosiasi untuk apa yang akan dikenal sebagai "*Trans-Pacific Partnership*,"

² *Ibid.*

³ *Op. Cit*

⁴ The Issue Report, The trans-pacific partnership

Terhadap TPP, Indonesia menghadapi persoalan yang lebih rumit. Tidak seperti kesepakatan perdagangan bebas lainnya, TPP mencakup bukan hanya perdagangan barang, jasa, dan investasi, tetapi juga aspek lainnya dari perdagangan, seperti penyelesaian sengketa dagang, perburuhan, dan lingkungan. Untuk sektor perdagangan barang, TPP menuntut penghapusan sekitar 11 ribu tarif dagang termasuk beberapa produk pertanian yang sensitif, seperti beras, gandum, gula, dan daging. Untuk sektor jasa, TPP mencakup sektor perbankan, asuransi, konstruksi, logistik, dan pariwisata. Untuk investasi, TPP mencakup repatriasi modal dan transfer modal, kompensasi yang jujur, dan kandungan lokal (*local content*).⁵

Pengaruh Amerika Serikat pada Kemitraan *Trans-Pacific Partnership*, menjadikan salah satu kesepakatan perdagangan terbesar dalam sejarah. Kesepakatan ambisius yang menjanjikan penghapusan semua tarif di antara 12 negara itu ditujukan untuk mematahkan penghalang investasi dan perdagangan di antara negara-negara yang mencakup sekitar 40 persen ekonomi dunia itu.⁶ Namun Penandatanganan yang menandai akhir dari negosiasi tersebut diwarnai oleh unjuk rasa di Selandia Baru, pengunjuk rasa berpendapat itu akan mengorbankan lapangan pekerjaan dan berdampak pada kedaulatan negara-negara Asia-Pasifik. Ribuan pengunjuk rasa memblokir jalan-jalan di luar lokasi penandatanganan TPP di Selandia Baru.⁷ Sebagai Penentang utama TPP di Selandia Baru.⁸

Kelompok yang menentang TPP menyata-

kan kekhawatiran tentang kerahasiaan di mana negosiasi dilakukan, potensi menggerus kekuatan negara dan mengatakan itu lebih untuk kepentingan Amerika Serikat. Lebih dari 1.600 perusahaan Amerika Serikat, yang paling sering berperkara di dunia⁹, akan mendapatkan hak baru yang dapat mereka terapkan lewat peradilan partikelir luar negeri. Sekitar 2.000 orang ambil bagian dalam beberapa aksi protes di pusat Auckland, banyak yang menutup persimpangan jalan-jalan utama¹⁰.

Indonesia berniat untuk bergabung dengan TPP¹¹ disambut baik Malaysia, Australia, dan Singapura yang telah bergabung dengan TPP.¹² Selain dengan tiga negara anggota TPP, Indonesia mengadakan pertemuan bilateral dengan delegasi dari delapan negara lain yaitu Taiwan, Rusia, Cina, Peru, Kanada, Amerika Serikat, Hong Kong, dan Thailand. Pertemuan tersebut dilaksanakan dalam rangka meningkatkan hubungan ekonomi dan perdagangan serta membahas isu-isu kerja sama perdagangan regional.

Pemerintah Indonesia¹³ menilai bahwa *Trans-Pacific Partnership* adalah kerja sama ekonomi lintas Pasifik, yang dimotori Amerika Serikat. Hakikatnya, liberalisasi perdagangan & investasi. TPP baik jika negara anggotanya siap, kepentingannya diwadahi, dan benar-benar memberikan keuntungan bersama. Sebaliknya, jika Indonesia merasa belum siap dan dipaksa masuk TPP, justru negara kita dirugikan. Indonesia belum ada keinginan bergabung ke TPP adalah karena sedang meningkatkan kesiapan

corporations before people and democracy, John a. Powell, elsadig elsheikh, and hossein ayazi, Haasinstitute. berkeley.edu/tpp

⁵ *Ibid*

⁶ The Issue Report, The trans-pacific partnership corporations before people and democracy, John a. Powell, elsadig elsheikh, and hossein ayazi, Haasinstitute. berkeley.edu/tpp

⁷ TPP akhirnya resmi berlaku ditandatangani 12 Negara <https://bisnis.tempo.co/read/news/2016/02/04/090742240/tpp-akhirnya-resmi-berlaku-ditandatangani-12-negara> diakses pada hari Jumat 22 juli 2016 pukul 2016

⁸ Profesor hukum Jane Kelsey, menulis di New Zealand Herald bahwa kesepakatan itu memberikan jaminan kepada negara-negara dan perusahaan asing hak untuk memberikan masukan dalam pengaturan keputusan yang tidak akan dimiliki oleh organisasi-organisasi lokal.

⁹ Negara-negara Pasifik Tanda Tangani Kesepakatan Perdagangan <http://www.antaraneews.com/berita/543619/negara-negara-pasifik-tanda-tangani-kesepakatan-perdagangan> di akses pada hari Sabtu 23 Juli 2016 pukul 14.20 Wib.

¹⁰ *Ibid*.

¹¹ Disampaikan Oleh Pemerintah Indonesia presiden Jokowi Kepada Presiden Amerika Serikat Barack Obama di Gedung Putih Washington Pada Hari Senin 26 Oktober 2015. Dan di lanjutkan Oleh mentri Lembong dengan mengadakan Pertemuan bilateral dengan negara Anggota TPP.

¹² Mau Gabung TPP Indonesia Lobi Tiga Negara di Forum APEC <https://bisnis.tempo.co/read/news/2015/11/20/090720618/mau-gabung-tpp-indonesia-lobi-tiga-negara-di-forum-apec> diakses pada hari juma't 22 juli 2016 pukul 11 .40 Wib

¹³ Pemerintah Indonesia pada Masa Pemerintahan Susilo Bambang Yudoyono pada Tahun 2014

untuk Masyarakat Ekonomi ASEAN. Indonesia juga harus untung dalam perdagangan ASEAN-Cina yang sudah disepakati. "Rakyat khawatir kalau kita tak siap & merugi dalam dua kerja sama ini, karena Indonesia sedang ikut negosiasi Kemitraan Ekonomi Komprehensif Regional (RCEP), yakni kerja sama ekonomi antara ASEAN+Tiongkok, Jepang, dan Korea¹⁴.

Dalam penelitian ini penulis menggunakan perspektif Sistem Dunia (*World Sistem Theory*) yang muncul sebagai kritik atas teori modernisasi dan teori dependensi. integrasi yang terjadi lebih banyak dikarenakan pasar (ekonomi) dan kepentingan politik.¹⁵ Ada dua atau lebih Negara interdependensi yang saling bekerja sama untuk memenuhi kebutuhan. Immanuel Wallerstein memandang bahwa dunia adalah sebuah sistem kapitalis yang mencakup seluruh negara di dunia tanpa kecuali. Terdapat satu atau dua persaingan politik untuk mendominasi yang dilakukan untuk menghindari hanya ada satu negara sentral yang muncul ke permukaan selamanya.

Menurut Wallerstein (1975), sistem dunia kapitalis dibagi ke dalam tiga jenis, yaitu negara *core* atau inti, semi-periferi atau semipinggiran, dan negara periferi atau pinggiran. Perbedaan bagi ketiga jenis negara ini adalah kekuatan ekonomi dan politik dari masing-masing kelompok. Kelompok negara-negara kuat (inti) mengambil keuntungan yang paling banyak, karena kelompok ini dapat memanipulasi sistem dunia sampai batas-batas tertentu dengan kekuatan dominasi yang dimilikinya. Kemudian negara semipinggiran mengambil keuntungan dari negara-negara pinggiran yang merupakan pihak yang paling dieksploitir.¹⁶

METODE

Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan teknik studi pustaka. Metode

kualitatif merupakan metode penelitian yang digunakan untuk meneliti kondisi objek alamiah, yang mana seorang peneliti dianggap sebagai instrumen kunci. Pendapat lain, Husaini Usman menyatakan bahwa alat pengumpul data atau instrumen penelitian dalam metode kualitatif adalah peneliti. Jadi, seorang peneliti merupakan *key instrument* dalam pengumpulan data dengan menggunakan teknik pengumpulan data seperti observasi partisipasi, wawancara dan dokumentasi. Penelitian kualitatif pada dasarnya dilakukan dalam situasi yang wajar (*natural setting*) dan data yang dikumpulkan juga berupa data yang umumnya bersifat kualitatif. Menurut Hendrarsono, pada dasarnya proses pengumpulan data dalam penelitian kualitatif tidak bersifat kaku, melainkan selalu disesuaikan dengan keadaan di lapangan¹⁷. Selain itu juga, hubungan antara peneliti dengan yang diteliti bersifat interaktif dan tidak dapat dipisahkan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Sejak awal kemunculannya hingga tahun 2008, TPP hampir tidak pernah mendapat perhatian global. Penyebabnya adalah TPP ini digagas oleh negara-negara yang tergolong kecil dalam perekonomian global, dilihat dari ukuran-ukuran ekonomi seperti Produk Domestik Bruto (PDB), populasi dan pertumbuhan ekonomi kumulatifnya tergolong kecil dan tidak signifikan dibandingkan ukuran global. TPP baru menjadi *headline* utama media-media di seluruh dunia ketika AS memutuskan masuk pada bulan September 2008. Masuknya AS ini menjadi hal yang penting bagi TPP karena secara signifikan meningkatkan daya tarik institusi tersebut, mengingat AS sendiri tercatat sebagai perekonomian terbesar di dunia.

Masuknya AS kemudian mendorong negara-negara lain untuk turut serta. Pada November 2008, Australia, Vietnam, dan Peru memutuskan untuk ikut serta. Pada tahun 2010, kerjasama ini berganti nama menjadi *Trans-Pacific Partnership* (TPP), yang menandai putaran negosiasi baru dan merupakan versi pengembangan dari

¹⁴ Presiden TPP tertarik TPP, Mengapa SBY dulu menolak? <https://m.tempo.co/read/news/2015/10/30/090714531/presiden-jokowi-tertarik-tpp-kenapa-sby-dulu-menolak> di akses Pada Hari Sabtu 23 Juli 2016 Pukul 15.00 Wib

¹⁵ Sistem Dunia dan Kolonialisme https://www.academia.edu/11704554/Sistem_Dunia_dan_Kolonialisme diakses pada hari Kamis 18 Agustus 2016 Pukul 17.30 Wib

¹⁶ http://www.academia.edu/4346658/Melihat_Mazhab_Anlisis_Sistem_Dunia_Dari_pemikiran_Immanuel_Wallerstein_dan_Samir_Amin. Diakses pada hari Kamis 18 Agustus 2016 Pukul 19.00 Wib

¹⁷ Hendrarsono, Emy Susanti. 2010. Metode Penelitian Sosial. Jakarta: PT Kencana

TPSEP. Pada Oktober 2010, Malaysia memutuskan untuk bergabung. Keputusan Malaysia ini diikuti oleh Kanada dan Meksiko pada bulan Januari 2012. Selanjutnya pada Maret 2013, pemerintah Jepang di bawah pemerintahan Shinzo Abe juga memutuskan ikut serta. Dengan demikian, hingga sekarang TPP memiliki 12 negara anggota.

Ekspanasi TPP menjadi 12 negara anggota ini menempatkannya dalam radar ekonomi global. TPP dipandang sebagai arus baru liberalisasi perdagangan bebas di kawasan Asia Pasifik yang sebelumnya sempat tersendat selama perundingan *Asia Pacific Economic Cooperation* (APEC). Secara ekonomi, negara-negara anggota TPP berkontribusi terhadap 40 persen PDB global. Populasi negara-negara anggota TPP juga cukup signifikan karena merepresentasikan 11,35 persen penduduk global atau 783 juta jiwa. Profil negara-negara anggota TPP merupakan daya tarik lain dari institusi tersebut. TPP berisikan gabungan negara-negara yang dianggap berpengaruh secara ekonomi (*economic great powers*). AS hingga kini tercatat sebagai perekonomian terbesar di dunia dengan PDB mencapai US\$ 14,5 triliun. AS juga selama beberapa dekade ini menjadi sumber utama pertumbuhan ekonomi global karena banyak menyerap impor dari negara-negara lain.

TPP diisi oleh negara-negara yang perannya kian diperhitungkan dalam ekonomi global. Chili, Meksiko, dan Vietnam merupakan representasi dari negara-negara berkembang yang posisinya terus menanjak dan menjadi incaran investasi dan perdagangan global. TPP juga banyak diisi oleh negara-negara Asia Timur yang ekonominya tergolong sangat dinamis. Asia Timur merupakan lokasi di mana negara-negara yang ada banyak disorot karena berhasil mentransformasi ekonominya dari negara miskin menjadi negara berkembang. Keanggotaan TPP juga menarik untuk dicermati karena mencerminkan diversitas ekonomi dunia. TPP tidak hanya diisi oleh kelompok negara-negara kaya seperti AS, Jepang, Singapura, Kanada, Australia, dan Selandia Baru, tapi juga diisi oleh negara-negara yang berpendapatan rendah hingga menengah seperti Meksiko dan Vietnam. Keanggotaan TPP juga

bersifat interregional karena negara-negara tersebut terletak di Amerika Utara, Amerika Selatan, Asia Timur, dan Pasifik Selatan.¹⁸

Sistem dunia adalah sistem sosial yang memiliki batasan, struktur, anggota, aturan legitimasi, dan koherensi.¹⁹ Dalam sistem dunia tenaga kerja sangat penting dalam hubungannya dengan produksi dan pertukaran barang serta bahan baku. Proses ini melahirkan dua wilayah utama yang bergantung pada satu sama lain yaitu inti (*core*) dan pinggiran (*periphery*). Adapun negara semi-pinggiran menjadi zona penyangga antara keduanya. Masing-masing memiliki karakter sendiri. Negara-negara inti fokus pada kapital, sedangkan negara-negara pinggiran pada tenaga kerja. Hubungan antara keduanya sangat struktural.

Kepemilikan teknologi, utamanya di jaman sekarang, sangat penting serta menjadi salah satu faktor penentu posisi negara. Sesuai dengan konsep K-wave yang meyakini bahwa perekonomian dunia berjalan mengikuti alur gelombang jangka panjang yang dinamis. Satu gelombang berlangsung selama 40 hingga 60 tahun dengan sebuah periode peningkatan ekonomi diikuti stagnansi atau depresi. Sejak krisis tahun 2008 kita berada di akhir gelombang ke-5 dan sedang memasuki gelombang ke-6. Masing-masing gelombang memiliki karakteristik sendiri. Misalnya, selama gelombang ke-4 (1930-1970) perekonomian dunia didominasi oleh eksplorasi minyak dan produksi mobil. Sementara itu sepanjang gelombang ke-5 (1970-2010) teknologi informasi dan komunikasi menjadi motor pertumbuhan ekonomi.

Berdasarkan konsep K-wave negara manapun yang menguasai sektor-sektor tersebut berarti memegang kendali perekonomian dunia. Bila kita kembalikan ke teori Wallerstein mengenai sistem dunia yang terbagi ke dalam negara inti dan pinggiran, maka cukup jelaslah penyebab negara-negara seperti Amerika Serikat, Jepang, serta yang berada di kawasan Eropa Barat be-

¹⁸ <http://www.lemhannas.go.id/portal/images/stories/humas/jurnal/edisi16> di akses pada hari Kamis 05 Januari 2017 Pukul 20.00 Wib.

¹⁹ Immanuel Wallerstein dalam sistem dunia dalam *World System Theory*

rada dikategori inti. Dalam konsep K-wave gelombang ke-6 yang dimulai tahun 2010 hingga setidaknya 2050 akan didominasi oleh sektor bioteknologi, nanoteknologi, dan layanan kesehatan. Teknologi informasi yang sudah tersistematis di gelombang sebelumnya memudahkan eksplorasi dan produksi dari sektor-sektor tersebut. Segelintir negara-negara maju telah memiliki modalnya termasuk unit *research and development* yang merupakan “otak” dari penemuan, pengembangan serta pengaplikasian teknologi yang ada. Pembicaraan semakin menegaskan monopoli negara-negara maju, terutama Amerika Serikat, dalam sistem ekonomi dunia dalam *Trans-Pacific Partnership* (TPP) atau Perjanjian Kerjasama Lintas Pasifik.

Satu hal yang akan sangat merugikan bagi banyak warga miskin di negara-negara pinggiran dan negara semi-pinggiran adalah tentang hak paten obat-obatan. Data-data tentang obat-obatan dan inovasinya ada di tangan institusi *research and development* swasta yang dimiliki perusahaan-perusahaan di negara-negara maju seperti Amerika Serikat. Dengan menggunakan perlindungan terhadap kekayaan intelektual sebagai tameng, Perwakilan Dagang Amerika Serikat (*US Trade Representative*) mengusulkan melalui TPP untuk memperketat kebijakan tersebut yang akan berimbas pada harga obat. Paten di hampir seluruh negara berlaku hingga 20 tahun sejak tanggal pendaftaran oleh pemegang hak paten. Negara yang seharusnya bertanggungjawab menyediakan layanan kesehatan bagi masyarakatnya harus tunduk pada aturan ini.

Sistem dunia bersifat sangat struktural. Negara-negara inti sudah terlalu lama menerapkan sistem kapitalis yang menguntungkan mereka. Tanpa mengecilkan peran tenaga kerja di negara-negara semi pinggiran dan pinggiran, tetapi kini tenaga kerja pun harus berilmu dan berketerampilan tinggi untuk memenuhi tuntutan produk yang juga semakin canggih. Hal ini sulit dicapai karena fasilitas pendidikan dan pelatihan kerja yang terjangkau di banyak negara miskin masih dalam kategori terbatas. Penduduk-penduduk di negara semi-pinggiran dan pinggiran

dibuai dengan janji ketersediaan lapangan pekerjaan meski dengan mengorbankan hak-hak dasar pekerja seperti kenaikan upah minimum dan hak membentuk serikat pekerja.

Menurut konsep K-wave negara-negara inti akan mendominasi perekonomian global. Karena negara-negara inti telah memulai pergerakan dalam monopoli bioteknologi dan layanan kesehatan yang menjadi komoditas utama gelombang ke-6. Kepemilikan informasi dan teknologi adalah faktor kunci dalam menentukan posisi Indonesia dalam perekonomian dunia saat ini. Negara seperti Indonesia dengan populasi yang besar dan mengandalkan ketersediaan tenaga kerja murah serta pasar yang besar hanya akan menjadi penyedia tenaga kerja dan berperan sebagai pasar produk-produk.

Perekonomian dunia dapat diidentifikasi berdasarkan dua skenario, pertama, *flexible market* yang mengutamakan peran pasar bebas dengan mengacu pada intensifikasi dan ekstensifikasi pasar regional dan pasar global. Dalam skenario pertama ini peran pemerintah dalam redistribusi dianggap tidak efisien, sehingga cenderung ditinggalkan. Peran individu dan pasar harus diutamakan dalam relasi ekonomi, karena negara/pemerintah dinilai bersifat memaksa dan tidak memberikan kebebasan serta membatasi inisiatif perorangan.

Keseimbangan peran pemerintah dan swasta tidak mudah dirumuskan, namun demikian menurut John Maynard Keynes, kritikus *the new right*, pemerintah harus mengatur masalah pengangguran dengan cara menjalankan defisit anggaran, menyuntikkan lebih banyak uang untuk ekonomi melalui *public spending* dan kemudian mengambil kembali melalui perpajakan. Ini artinya pemerintah tetap berperan terutama dalam kaitannya dengan penanganan masalah pengangguran yang menjadi masalah utama dalam ekonomi, dibanding dengan persoalan inflasi yang menjadi fokus perhatian para penganut ekonomi pasar.²⁰

Joseph E. Stiglitz menilai perjanjian dagang baru, TPP sarat dengan kepentingan politik. AS dan dunia terlibat dalam perdebatan besar tentang

²⁰ Ganewati Wuryandari, dkk, *Op.Cit.*, Hal 78-81.

perjanjian dagang baru. Fakta yang biasa disebut FTA ini, pada kenyataannya adalah perjanjian dagang yang diatur, yang disesuaikan demi kepentingan korporasi di AS dan Uni Eropa. Saat ini perjanjian tersebut lebih sering disebut sebagai kemitraan, sebagaimana dimaksud dalam *Trans Pacific-Partnership*. Tetapi yang disebut di sini bukanlah kemitraan setara, karena AS yang secara efektif menentukan syarat-syaratnya. Penerima Nobel bidang ekonomi dan profesor pada *Columbia University*, AS ini menilai perjanjian dagang TPP sudah melampaui batas perdagangan. Bahkan, sampai mengatur investasi dan kekayaan intelektual, dengan memaksakan perubahan fundamental terhadap kerangka hukum, peradilan, dan peraturan negara. Semua itu dilakukan tanpa masukan atau akuntabilitas melalui lembaga-lembaga demokratis. Menurut Stiglitz, agenda sesungguhnya dari ketentuan sepihak ini adalah untuk menghambat peraturan menyangkut kesehatan, lingkungan, keselamatan, bahkan peraturan keuangan yang sejatinya dimaksudkan untuk melindungi ekonomi dan warga AS sendiri. Berkat ketentuan tersebut, korporasi dapat menuntut kompensasi penuh dari pemerintah untuk tiap berkurangnya profit akibat terjadinya perubahan peraturan.

Hal yang mendasar dari sistem pemerintahan AS adalah peradilan umum memihak, dengan standar hukum yang dibangun selama puluhan tahun, berdasarkan prinsip-prinsip transparansi, preseden, dan kesempatan untuk mengajukan banding atas putusan yang tidak menguntungkan. Sekarang, semua itu justru sedang dikesampingkan, karena perjanjian baru ini lebih mendorong ke arbitrase yang bersifat swasta, tidak transparan, dan berbiaya sangat mahal. Selain itu, perjanjian dagang ini sarat dengan konflik kepentingan. Korporasi berkepentingan dengan perjanjian dagang yang hanya terbatas demi keuntungan. Semua itu memengaruhi daya tawar (*bargaining power*) relatif, dengan implikasi penting bagi ketidaksetaraan yang saat ini menjadi masalah yang terus berkembang di seluruh dunia.²¹

²¹ <http://indonesian.tribe.ir/editorial/cakrawala/item/102527-mengapa-tpp-harus-ditolak>, Diakses pada 17 November 2015, Pukul 12.38 WIB.

SIMPULAN

TPP merupakan bukti diplomasi luar negeri dalam memberikan tawaran berbagai macam teori dalam memahami dan menjelaskan fenomena hubungan internasional. Jika Indonesia ikut dalam perjanjian perdagangan ini akan berpengaruh dalam jangka masa panjang berkenaan dengan Politik dan Ekonomi Domestik Indonesia. TPP boleh ditandatangani sekiranya isu-isu yang diutarakan oleh golongan akademik dan pihak berkepentingan dapat diatasi terlebih dahulu. Sekiranya ia tidak dapat atasi dengan sebaik-baiknya, lebih baik negara tidak langsung menandatangani. Hingga Indonesia mempersiapkan negara dengan sebaik mungkin. Alternatif lain adalah dengan menjalin perjanjian bilateral dengan AS tanpa melalui TPP.

DAFTAR RUJUKAN

- Australia, C. K., 2009. Further Analytical Study on the Likely Economic Impact of an FTAAP – Paper. *Concluding Senior Officials' Meeting – Retreat Session*, (pp. 1-41). Singapore.
- Bergsten, C. F. 2005. "A New Foreign Policy for the United States." Pp. 3-61 in *The United States and The World Economy*. Washington DC: Institute for International Economics.
- Burchill, Scott. 2005. *The National Interest in International Relations Theory*. Palgrave Macmillan.
- Deborah, C Elms. 2012. *The Trans-Pacific Partnership Agreement TPP Negotiations : Overview and Prospects*.
- Elms, Deborah. 2009. "From the P4 to the TPP: Explaining Expansion Interests in the Asia Pacific." United Nations Economic and Social Commission for Asia and the Pacific.
- E. Manyin, Mark. 2012. *Pivot To The Pacific? The Obama Administration's "Rebalancing" Toward Asia*. Congressional Research Paper. Congressional Research Service, Washington.
- Smith, Steve, Amelia Hadfield, and Timothy Dunne, eds. 2008. *Foreign policy: theories, actors, cases*. Oxford University Press.